

KEPEMIMPINAN TRUMP DAN NASIONALISME SUMBER DAYA: REFLEKSI TERHADAP KEMANDIRIAN DOKTRIN PERTAHANAN INDONESIA

Afrilian Sukarno Timur, Rahmad Saerodin, Tarsisius Susilo, Tedy Basuki,
Ignatius Widi Nugroho

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia

1afriliannanatur@gmail.com, 2rsaerodin@gmail.com, 3muchus70@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini menganalisis kepemimpinan Donald Trump yang berhaluan nasionalisme sumber daya melalui kebijakan “*America First*” dan implikasinya bagi strategi kemandirian logistik serta doktrin pertahanan Indonesia. Polarisasi geopolitik multi-domain (energi, teknologi, siber, informasi) di era Trump ditandai oleh penekanan pada kemandirian nasional, misalnya penarikan diri dari kesepakatan global (Perjanjian Paris) dan dorongan eksploitasi penuh sumber daya energi domestik. Gaya kepemimpinan Trump digambarkan populis, proteksionis, isolasionis, dan nasionalis, berorientasi transaksional dalam mengejar kepentingan Amerika. Kajian terdahulu banyak membahas kebijakan Trump secara umum, namun belum mengupas dampaknya terhadap konsep kemandirian pertahanan Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus komparatif, penelitian ini membandingkan strategi “*America First*” (AS) dan upaya “*Indonesia First*” (RI) dalam mewujudkan kemandirian di sektor pertahanan. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan Trump dalam re-industrialisasi pertahanan dan “dominasi energi” di AS memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian alutsista dan logistik pertahanan sesuai nilai Pancasila dan semangat berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Indonesia perlu membangun postur pertahanan mandiri yang ditopang industri nasional kuat dan cadangan sumber daya strategis, sembari tetap menjalin kerjasama internasional secara bebas-aktif. Doktrin pertahanan Indonesia masa depan disarankan mengambil bentuk “Kemandirian Aktif”: mandiri dalam kemampuan pertahanan, namun proaktif dalam diplomasi keamanan. Langkah ini akan meningkatkan kesiapan TNI menghadapi disrupsi global sekaligus menjamin kedaulatan dan martabat pertahanan Indonesia jangka panjang.

Kata Kunci: Kepemimpinan Trump, Nasionalisme, Sumber Daya, Refleksi, Kemandirian, Doktrin Pertahanan Indonesia.

Abstract : *This study examines Donald Trump’s leadership characterized by resource nationalism under the “America First” policy and its implications for Indonesia’s defense logistics self-reliance strategy and doctrine. Geopolitical polarization across multiple domains (energy, technology, cyber, information) during Trump’s era was marked by an emphasis on national self-reliance, for example, withdrawing from global agreements (Paris Accord) and pushing full exploitation of domestic energy resources. Trump’s leadership style has been described as populist, protectionist, isolationist, and nationalist, often pursuing transactional “deal-making” to advance U.S. interests. Prior studies discuss Trump’s policies broadly, but have yet to explore their impact on Indonesia’s defense independence concept. Using a descriptive-qualitative approach and comparative case study, this research juxtaposes the “America First” strategy (USA) with “Indonesia First” efforts in achieving self-reliance in the defense sector. Findings indicate Trump’s policies of defense re-industrialization and energy “dominance” in the U.S. provide valuable lessons for Indonesia to strengthen its defense equipment and logistics autonomy in line with Pancasila values and the spirit of berdikari (standing on one’s own feet). Indonesia should develop a self-reliant defense posture supported by a strong domestic industry and strategic resource reserves, while still engaging internationally under its independent-and-active foreign policy. Indonesia’s future defense doctrine should embody “Active Self-Reliance”: achieving autonomy in defense capabilities, yet remaining proactive in defense diplomacy. This approach would enhance the Indonesian Armed Forces’*

readiness amid global disruptions and ensure the long-term sovereignty and dignity of Indonesia's defense.

Keywords: *Trump's leadership, nationalism, resources, reflection, independence, doctrine Indonesian defence.*

Pendahuluan

Pada era kepemimpinan Presiden Donald Trump (2017–2020), konstelasi geopolitik global mengalami polarisasi yang tajam di berbagai domain strategis. Kebijakan “*America First*” yang diusung Trump menekankan kemandirian nasional Amerika Serikat, mulai dari sektor ekonomi, energi, hingga pertahanan. Hal ini terlihat dari langkah-langkah Trump yang cenderung *inward-looking*, misalnya menerapkan tarif tinggi yang mengguncang tatanan perdagangan dunia. Di tengah melemahnya efektivitas institusi global dan *rules-based order*, banyak negara terpacu mengutamakan kepentingan domestik masing-masing. Trump menjalankan strategi *America First*, dibalas oleh Xi Jinping dengan *China First*, sehingga negara-negara lain pun menggemakan “*my country first*”. Kondisi ini mencerminkan kecenderungan nasionalisme sumber daya, di mana negara-negara berlomba menguasai dan memanfaatkan sumber daya strategisnya secara mandiri demi keamanan nasional.

Kebijakan Trump berfokus pada upaya menghidupkan kembali industri dalam negeri Amerika dan mencapai kedaulatan energi penuh bagi AS. Ia mendorong peningkatan produksi minyak, gas, dan batu bara domestik dalam kerangka “*Energy Dominance*”, dengan dalih bahwa Amerika yang kuat harus didukung oleh pemanfaatan penuh sumber daya energinya sendiri. Trump bahkan menunjuk loyalis di kabinetnya untuk menjalankan motto “*Drill, baby, drill*” secara agresif. Di level global, ia menarik AS keluar dari kesepakatan multilateral seperti Perjanjian Paris dan memangkas kontribusi pada program bantuan iklim, dengan alasan melindungi kemandirian ekonomi Amerika. Langkah-langkah unilateral ini memperlihatkan orientasi Trump yang proteksionis dan unilateral, berbeda dari pendekatan pendahulunya.

Meskipun sudah banyak kajian mengenai kebijakan Trump, sebagian besar masih bersifat deskriptif umum dan berfokus pada dampaknya di panggung global atau terhadap negara maju lain. *Belum ada* penelitian yang secara spesifik mengaitkan gaya kepemimpinan Trump dalam nasionalisme sumber daya dengan implikasinya bagi doktrin pertahanan Indonesia, khususnya aspek kemandirian logistik pertahanan. Padahal, Indonesia sebagai negara berkembang yang menganut prinsip *bebas-aktif* dapat terpengaruh oleh perubahan tatanan global akibat kebijakan Amerika. Doktrin pertahanan Indonesia sejak lama menjunjung kemandirian (*self-reliance*), sejalan dengan nilai ideologis Pancasila dan semboyan *berdikari* yang dicetuskan Bung Karno (berdiri di atas kaki sendiri). Prinsip berdikari ini menegaskan kemandirian politik dan ekonomi bangsa: “berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan”. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama di bidang pemenuhan alat pertahanan yang banyak bergantung impor. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana *lessons learned* dari era Trump dapat digunakan untuk merefleksikan strategi Indonesia dalam mencapai kemandirian pertahanan yang lebih kuat.

Pertanyaan penelitian: Bagaimana gaya kepemimpinan Donald Trump dalam nasionalisme sumber daya (“*America First*”) berimplikasi pada strategi kemandirian logistik dan doktrin pertahanan Indonesia? Pertanyaan ini mencakup sub-pertanyaan: (1) Apa ciri utama nasionalisme ekonomi-pertahanan Trump dan dampaknya secara geopolitik? (2) Apa pelajaran positif maupun negatif yang dapat diambil Indonesia dari kebijakan tersebut? (3) Bagaimana relevansinya terhadap konsep

kemandirian alutsista dan logistik dalam doktrin pertahanan Indonesia saat ini, serta penyesuaian apa yang diperlukan ke depan?

Studi ini menemukan bahwa kebijakan Trump dalam re-industrialisasi pertahanan dan swasembada energi memberi sinyal urgensi bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional berbasis sumber daya sendiri. Prinsip *America First* ala Trump menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi dan teknologi merupakan prasyarat kekuatan militer. Hal ini selaras dengan semangat kemandirian yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33 (kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat). Dengan belajar dari pengalaman Amerika Serikat, Indonesia didorong untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor senjata, dan membangun cadangan logistik strategis (BBM, amunisi, suku cadang) demi kesiapan pertahanan. Kebijakan Trump bukan untuk ditiru sepenuhnya, namun memberikan cerminan bahwa kemandirian pertahanan bukan pilihan opsional melainkan keharusan jika Indonesia ingin menjadi negara kuat dan bermartabat di kancah global.

Struktur artikel ini dimulai dengan tinjauan pustaka atas konsep nasionalisme sumber daya, karakter kepemimpinan Trump, dan doktrin pertahanan Indonesia terkait kemandirian. Bagian metode menjelaskan desain penelitian. Selanjutnya, analisis dan pembahasan disajikan dalam beberapa sub-topik: (a) implementasi *America First* dan nasionalisme sumber daya di AS, (b) implikasi geopolitik serta pelajaran positif-negatif bagi Indonesia, (c) kondisi dan upaya kemandirian logistik pertahanan Indonesia, (d) refleksi nilai Pancasila dan doktrin TNI terkait kemandirian, dan (e) rekomendasi strategis doktrin Kemandirian Aktif. Terakhir, simpulan merangkum temuan utama dan implikasi kebijakan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Nasionalisme Sumber Daya

Nasionalisme sumber daya (*resource nationalism*) merujuk pada kebijakan ekonomi-politik di mana negara memprioritaskan kontrol dan pemanfaatan sumber daya alam domestik untuk kepentingan nasional. Literatur menunjukkan bahwa nasionalisme sumber daya sering mencuat ketika situasi global dianggap tidak menguntungkan atau mengancam kedaulatan ekonomi negara. Langkah-langkahnya antara lain: mengamankan pasokan energi dalam negeri, melindungi industri strategis, hingga pembatasan ekspor bahan mentah demi kebutuhan nasional. Dalam konteks Amerika Serikat di bawah Trump, nasionalisme sumber daya termanifestasi jelas melalui agenda "*Energy Dominance*". Dokumen National Security Strategy (NSS) 2017 menegaskan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, AS akan menjadi bangsa yang *energy-dominant*, dengan memanfaatkan posisi Amerika sebagai produsen dan konsumen energi terbesar demi memastikan keamanan ekonomi dan energi nasional. NSS tersebut juga menyatakan bahwa melimpahnya sumber energi domestik (fosil maupun terbarukan) harus "dibebaskan" untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengurangi hambatan regulasi yang menghalangi produksi energi. Kebijakan *energy dominance* ini sejalan dengan nasionalisme ekonomi: Trump memandang bahwa memaksimalkan produksi minyak, gas, dan batubara dalam negeri akan membuat Amerika mandiri energi sekaligus memperkuat basis industri domestik.

Dalam literatur pertahanan Indonesia, konsep kedaulatan energi juga mendapat perhatian karena keterkaitannya dengan ketahanan nasional. Kedaulatan energi diartikan sebagai hak dan kemampuan negara dalam menentukan kebijakan energi secara mandiri untuk menjamin pasokan dalam negeri tanpa intervensi asing. Kementerian Pertahanan RI menekankan bahwa ketersediaan energi adalah faktor kunci stabilitas keamanan nasional. Bahkan, energi dianggap sebagai salah satu tulang punggung operasional pertahanan, baik di masa damai maupun darurat. Dengan demikian, nasionalisme

sumber daya bukan semata isu ekonomi, tetapi berimplikasi langsung pada kekuatan pertahanan suatu negara. Pemanfaatan sumber daya alam strategis (minyak bumi, mineral rare-earth, dsb.) dipandang perlu dioptimalkan untuk kepentingan rakyat dan ketahanan negara sesuai konstitusi (Pasal 33 UUD 1945).

Kepemimpinan Trump – Gaya dan Ideologi

Donald Trump dikenal membawa gaya kepemimpinan yang tidak konvensional ke Gedung Putih. Ideologi politik dan pendekatan kepemimpinannya kerap dirujuk sebagai “Trumpisme”, yang mencakup populisme nasionalis, proteksionisme ekonomi, skeptisisme terhadap aliansi multilateral, serta orientasi transaksional dalam diplomasi. Sumber ensiklopedia dan analisis politik menggarisbawahi bahwa posisi politik Trump “digambarkan sebagai populis, proteksionis, isolasionis, dan nasionalis”. Artinya, Trump mengedepankan retorika populis (mendahulukan “warga kebanyakan” Amerika), kebijakan proteksionis (melindungi industri dalam negeri dengan tarif dan hambatan dagang), bersikap isolasionis (enggan terlibat jauh dalam masalah internasional kecuali menguntungkan AS), serta nasionalis (mengutamakan kedaulatan dan kebanggaan nasional). Ciri lain yang banyak dicatat adalah gaya transaksional Trump, ia memandang hubungan internasional layaknya negosiasi bisnis, dimana setiap kesepakatan harus berimbang menurut kacamata keuntungan langsung bagi Amerika. Misalnya, dalam konteks NATO, Trump secara terang-terangan menuntut sekutu membayar porsi lebih besar untuk pertahanan bersama, sejalan slogannya “*We’re not the world’s piggy bank*”.

Secara ideologis, Trumpisme juga ditopang sentimen *anti-establishment* dan penolakan terhadap konsensus global liberal. Trump meragukan banyak pakta dan komitmen internasional yang dianggapnya merugikan AS. Contoh nyata adalah penarikan AS dari Perjanjian Iklim Paris 2015, dengan alasan kesepakatan itu menghambat industri energi fosil AS sementara memberi kelonggaran bagi negara lain. Langkah ini mengirim sinyal bahwa di bawah Trump, Amerika lebih mementingkan kemandirian ekonomi-domestiknya daripada kepemimpinan global dalam isu bersama. Selain itu, Trump keluar dari perjanjian perdagangan Trans-Pasifik (TPP) dan kerap mengancam merombak atau keluar dari aliansi/perjanjian pertahanan tradisional jika dianggap tidak “*fair deal*” bagi AS. Sikap ini konsisten dengan teori kepemimpinan transaksional, di mana hubungan dipandang sebagai pertukaran *quid pro quo* (ada imbal balik konkret). Namun, kritikus mencatat risiko pendekatan ini: jangka pendek mungkin diperoleh konsesi, tapi jangka panjang merusak kepercayaan sekutu dan tatanan internasional yang stabil.

Dari sisi teori kepemimpinan, Trump tidak memenuhi tipe *transformational leader* yang menginspirasi tatanan baru kolektif, melainkan lebih dekat ke *transactional leader* yang fokus pada hasil cepat dan keuntungan relatif. Meski demikian, basis pendukung Trump di dalam negeri melihatnya sebagai figur yang *adaptive* terhadap keresahan rakyat (misal: hilangnya lapangan kerja manufaktur, imigrasi ilegal, dsb.). Dalam kerangka *Adaptive Leadership* (Heifetz), Trump muncul dengan menawarkan solusi non-konvensional terhadap disrupsi globalisasi yang dirasakan konstituennya. Ia “mengambil risiko” keluar dari pola lama demi membuktikan komitmennya memenuhi janji kampanye *America First*. Hal ini menarik untuk dibandingkan dengan kepemimpinan Indonesia yang historisnya mengedepankan *transformational leadership* berbasis ideologi (Pancasila, Trisakti) namun kini dituntut juga adaptif menghadapi rivalitas kekuatan besar.

Doktrin Pertahanan Indonesia & Kemandirian

Indonesia memiliki ciri doktrin pertahanan yang unik dikenal dengan prinsip Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) atau *Total People's Defense*. Doktrin ini menekankan bahwa pertahanan negara merupakan upaya total, melibatkan seluruh komponen bangsa (militer, rakyat, sumber daya alam) secara terpadu. UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 menyebutkan sistem pertahanan bersifat semesta, dengan partisipasi segenap warga dan sumber daya nasional demi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Implikasinya, konsep kemandirian dalam pertahanan sudah melekat sejak awal pada strategi Indonesia: bangsa Indonesia harus mampu membela diri dengan kekuatan sendiri semaksimal mungkin.

Literatur tentang pertahanan Indonesia kerap menyoroti pentingnya kemandirian alutsista (alat utama sistem senjata) dan logistik. Pengalaman embargo militer di masa lalu (seperti embargo senjata oleh AS di akhir 1990-an) menjadi pelajaran pahit bahwa ketergantungan pada pihak asing adalah kelemahan strategis. Oleh sebab itu, pemerintah telah menggagas kemandirian industri pertahanan melalui UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Undang-undang ini mewajibkan prioritas penggunaan produksi dalam negeri dan transfer teknologi dalam setiap pengadaan. Target jangka panjangnya, pada tahun 2045 minimal 85% alutsista TNI berasal dari produksi industri dalam negeri. (Sebagai perbandingan, per 2017 sekitar 53% alutsista TNI telah dapat dipenuhi industri dalam negeri) Pencapaian ini diharapkan akan mengurangi ketergantungan impor drastis, sehingga Indonesia tidak mudah dipengaruhi tekanan luar di bidang pertahanan.

Dari sisi grand strategy, kemandirian pertahanan Indonesia juga berakar pada filosofi “Berdikari” yang digaungkan sejak Orde Lama. Presiden Sukarno menekankan prinsip berdikari ekonomi dan militer, contohnya dengan kebijakan diversifikasi sumber persenjataan (tidak terpaku blok Barat saja) dan membangun industri strategis domestik (seperti Pabrik Senjata PINDAD sejak 1950-an). Era Orde Baru melanjutkan melalui kebijakan “*Indonesia First*” ala Soeharto, misalnya pembentukan posisi Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri tahun 1983. Artinya, upaya memprioritaskan produk dan kepentingan nasional sudah lama menjadi arus utama kebijakan ekonomi-pertahanan Indonesia. Nilai-nilai kemandirian ini juga diperkuat oleh tradisi nilai juang TNI yang lahir dari revolusi kemerdekaan: keberanian, kemanunggalan TNI-rakyat, rela berkorban, semangat pantang menyerah, patriotisme, dan kesemestaan. Nilai-nilai perjuangan 1945 tersebut meneguhkan bahwa TNI berjuang bersama rakyat secara mandiri melawan penjajah, nyaris tanpa dukungan asing. Sejarah itu membentuk budaya pertahanan Indonesia yang sangat menghargai kemandirian dan *resilience*.

Namun demikian, studi terdahulu menunjukkan *gap* antara ideal dan realita. Banyak analis mencatat bahwa hingga dekade terakhir, ketergantungan Indonesia pada alutsista impor masih tinggi, mulai dari pesawat tempur, kapal perang, hingga teknologi sensor dan radar. Walau industri pertahanan lokal (PT DI, PT PAL, PT Pindad, dll.) berkembang, transfer teknologi yang didapat sering terbatas. Beberapa peneliti (misalnya di Lemhannas dan akademisi pertahanan) menekankan perlunya *political will* lebih kuat dan anggaran riset besar agar Indonesia bisa mengejar kemandirian teknologi militer. Selain itu, konsep kemandirian sering berbenturan dengan tuntutan *interoperability* dan standar aliansi dalam operasi global; misal, untuk *peacekeeping* PBB, Indonesia tetap harus punya persenjataan kompatibel standar barat. Hal-hal ini menjadi kendala tersendiri.

Penelitian Terdahulu terkait Indonesia First

Beberapa literature dan artikel opini mengkaji konsep “*Indonesia First*” dalam sejarah kebijakan nasional. Irman Gusman (2025) mencatat bahwa jauh sebelum Trump mencetuskan *America First*, Indonesia telah memiliki semangat *Indonesia First* sejak Orde Lama dan Orde Baru. Era Sukarno dengan

Trisakti-nya (berdikari dll.) dan era Soeharto dengan kebijakan substitusi impor menunjukkan benang merah mengutamakan kepentingan nasional domestik terlebih dahulu. Gusman menekankan bahwa Indonesia sesungguhnya “tidak pernah anti globalisasi”, namun belajar bahwa ketahanan dalam negeri adalah fondasi untuk dapat bersaing global. Sayangnya, menurut beliau, setelah Orde Baru, Indonesia sempat “lupa berdikari” karena euforia pasar bebas, sehingga guncangan eksternal (krisis global) kerap menggoyahkan ekonomi nasional. Pendekatan pembangunan pasca-1998 cenderung liberalisasi pasar tanpa memperkuat daya saing industri lokal, berakibat defisit perdagangan dan deindustrialisasi dini. Oleh karenanya, semangat Berdikari perlu digelorakan kembali.

Penelitian lain menyoroti perbandingan antara kebijakan luar negeri bebas-aktif Indonesia dengan politik *America First AS*. Misalnya, ada tesis yang membahas bagaimana Indonesia berusaha menjaga otonomi strategisnya di tengah rivalitas AS-Tiongkok, serupa tapi tak sama dengan pendekatan unilateral Trump. Hasilnya, Indonesia memilih tidak berpihak (non-blok), namun di saat sama meningkatkan kerja sama pragmatis dengan banyak negara demi mengurangi ketergantungan pada satu pihak. Ini berbeda dengan Trump yang cenderung mengabaikan banyak mitra tradisional. Belum ada penelitian yang menyambungkan titik antara *Trumpism* dan *Indonesian Defense Doctrine*, sehingga artikel ini mencoba mengisi celah itu.

Secara umum, *state of the art* menunjukkan bahwa studi tentang nasionalisme ekonomi Trump dapat memberikan perspektif baru bagi wacana kemandirian pertahanan di Indonesia. Dengan mengkaitkan dua konteks berbeda ini, diharapkan kontribusi teori mengenai adaptasi doktrin pertahanan di era kompetisi kekuatan besar.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus komparatif. Fokus komparasi di sini tertuju pada dua kasus: (1) Kebijakan nasionalisme sumber daya ala Donald Trump di AS (periode utama 2017–2020), dan (2) Kebijakan dan doktrin pertahanan Indonesia terkait kemandirian (periode terkini, sekitar 2014–2024). Unit analisis mencakup dokumen strategi resmi, pernyataan kebijakan, serta capaian empiris di kedua negara tersebut.

Pengumpulan data: Penelitian ini mengandalkan data sekunder berupa literatur dan dokumen. Sumber primer mencakup dokumen kebijakan resmi seperti *National Security Strategy 2017* dan *pidato kenegaraan/pidato keamanan Trump* yang merepresentasikan strategi *America First*. Selain itu, sumber primer Indonesia termasuk dokumen Kementerian Pertahanan (misal: Renstra Kemhan, buku putih pertahanan, buletin pertahanan terkait energi), serta doktrin TNI. Sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, laporan think-tank (RAND, CSIS, RIFS Potsdam), artikel berita analisis (Antara, Times Indonesia, dsb.), dan publikasi akademik tentang kepemimpinan Trump maupun kebijakan pertahanan Indonesia.

Kerangka teori: Penelitian ini memanfaatkan kerangka teori kepemimpinan strategis, khususnya konsep *Adaptive Leadership* (Heifetz) dan *Transformational vs. Transactional Leadership* (Bass). Teori *Adaptive Leadership* digunakan untuk menganalisis bagaimana pemimpin menghadapi tantangan disruptif global dan melakukan penyesuaian kebijakan. Ini relevan untuk melihat respons Trump terhadap tantangan globalisasi (misal: deindustrialisasi, ancaman Tiongkok) maupun respons Indonesia terhadap rivalitas kekuatan besar. Sementara teori *Transformational vs. Transactional Leadership* dipakai memahami gaya Trump (lebih transaksional) versus ideal pemimpin Indonesia yang transformasional (mengubah sistem) namun harus bersifat adaptif. Selain itu, konsep Resiliensi Nasional dan Keamanan Energi juga menjadi landasan analisis, karena kemandirian pertahanan sangat terkait dengan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya lainnya.

Analisis data: Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*) kualitatif. Pertama, dilakukan reduksi data dengan memilah informasi relevan mengenai kebijakan Trump dan kondisi pertahanan Indonesia. Kedua, dilakukan kategorisasi tematik sesuai sub-topik (nasionalisme sumber daya, geopolitik, logistik pertahanan, ideologi pertahanan, dll.). Selanjutnya, penulis melakukan perbandingan bersifat interpretatif: prinsip-prinsip *America First* dibandingkan dengan konsep *Indonesia First/Berdikari*. Dari perbandingan ini, diidentifikasi elemen-elemen yang *konvergen* (misal: dorongan swasembada) maupun *divergen* (misal: unilateralisme vs bebas-aktif). Interpretasi kemudian diarahkan pada relevansi praktis: bagaimana implikasi kebijakan Trump dapat diterapkan atau diantisipasi dalam konteks doktrin TNI dan pembangunan pertahanan Indonesia. Untuk menjamin validitas, dilakukan triangulasi sumber: misalnya, satu fakta tentang produksi alutsista domestik didukung oleh data UU, pernyataan pejabat, dan analisis pakar.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi analitik di bagian berikut (Analisis dan Pembahasan), diikuti rekomendasi. Karena sifat penelitian ini kualitatif-deskriptif, generalisasi luas tidak menjadi tujuan utama; fokusnya pada pemahaman mendalam (*insightful understanding*) yang diharapkan berguna bagi perumus kebijakan pertahanan Indonesia.

Analisis dan Pembahasan

America First dan Nasionalisme Sumber Daya di AS

Kebijakan America First di bawah Donald Trump merefleksikan bentuk nyata nasionalisme sumber daya di Amerika Serikat. Trump berangkat dari premis bahwa Amerika telah dirugikan oleh globalisasi dan aturan multilateral, sehingga perlu “merebut kembali” kedaulatan ekonomi dan militernya. Salah satu pilar utamanya adalah mencapai swasembada di sektor energi dan industri pertahanan. Pemerintahan Trump secara agresif mendorong peningkatan belanja militer dalam negeri dan pemulihan kemampuan manufaktur AS. Anggaran pertahanan AS meningkat signifikan pada era Trump, dialokasikan antara lain untuk memodernisasi persenjataan serta mendukung basis industri militer domestik. Selain itu, Trump mengeluarkan kebijakan *Buy American* dan aturan *offset* yang ketat agar pengadaan alutsista AS sebisa mungkin menggunakan komponen buatan Amerika. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada pemasok luar negeri dan mengembalikan lapangan kerja industri di dalam negeri.

Di sektor energi, doktrin “*Energy Dominance*” dicanangkan untuk menjadikan AS eksportir bersih energi fosil. Trump mencabut banyak regulasi lingkungan yang dianggap menghambat produksi minyak, gas, dan batu bara. Hasilnya, produksi minyak serpih (*shale oil*) dan gas alam AS mencapai rekor tertinggi, menempatkan AS sebagai produsen minyak terbesar dunia selama masa jabatannya. NSS 2017 dengan tegas menyatakan: “*For the first time in generations, the United States will be an energy-dominant nation.*”, Amerika hendak memosisikan diri di pusat sistem energi global sebagai produsen terkemuka. Strategi ini diklaim akan merangsang ekonomi domestik sekaligus memperkuat keamanan energi jangka panjang. Trump juga membuka kembali lahan-lahan federal untuk pengeboran minyak dan penambangan batu bara, sesuatu yang kontroversial mengingat dampak lingkungannya. Namun, dari kacamata nasionalisme sumber daya, langkah tersebut memenuhi janji kepada konstituen domestik: AS tidak boleh bergantung pada minyak OPEC atau gas Rusia, melainkan berdikari energi.

Di arena internasional, Trump tidak segan menggunakan pendekatan transaksional dan konfrontatif demi mendukung nasionalisme ekonominya. Ia memberlakukan tarif impor tinggi terhadap baja dan aluminium (dengan dalih keamanan nasional Section 232) guna melindungi industri logam AS. Mitra dagang tradisional seperti Uni Eropa, Kanada, dan bahkan sekutu Asia (Jepang, Korea) ikut

merasakan dampak tarif ini, memicu friksi perdagangan. Trump juga terlibat perang dagang dengan Tiongkok, mengenakan tarif ratusan miliar dolar atas barang Tiongkok untuk menekan defisit dan memaksa relokasi rantai pasok ke AS. Kebijakan ini relevan dengan *resource nationalism* karena Tiongkok dituduh Trump mencuri teknologi dan *rare materials* strategis dari AS; dengan tekanan tersebut, Trump berharap industri berteknologi tinggi (misal semikonduktor) kembali diproduksi di tanah Amerika demi keamanan nasional. Pada konteks pertahanan, Trump mendorong reshoring industri pertahanan: perusahaan AS yang memasok militer “diminta” memulangkan produksi ke AS atau minimal ke negara sekutu dekat. Implikasinya, di masa Trump AS semakin sedikit mengimpor alutsista dari luar (cenderung mengandalkan produksi sendiri atau joint-production dengan sekutu).

Selain mengutamakan kemandirian suplai, Trump juga menuntut pembagian beban (*burden-sharing*) yang lebih adil dalam aliansi. Ia secara terbuka mengecam banyak sekutu NATO karena “menumpang gratis” keamanan dari AS. Hasil desakan ini, NATO mengakui adanya peningkatan kontribusi anggaran pertahanan oleh negara-negara anggota sejak 2017. Dari sudut pandang Trump, hal itu mengurangi beban Amerika dan memungkinkan fokus pada kepentingan domestik.

Singkatnya, *America First* membentuk kebijakan AS menjadi semacam nasionalisme ekonomi-pertahanan terpadu: memproteksi pasar domestik, memaksimalkan produksi sumber daya sendiri, dan meminimalkan ketergantungan eksternal baik dalam energi maupun alutsista. Langkah-langkah ini menjadikan AS di era Trump lebih otonom dalam memenuhi kebutuhannya, meski dengan konsekuensi meningkatnya tensi dengan negara lain.

Implikasi Geopolitik dan Pelajaran Positif-Negatif

Kebijakan proteksionis Trump mengubah dinamika geopolitik global secara signifikan. Di satu sisi, *America First* menginspirasi tren serupa di berbagai negara, yang disebut beberapa pengamat sebagai era “neo-nasionalisme”. Sebagaimana diungkap Irman Gusman, ketika Trump mengutamakan Amerika, Xi Jinping pun membalas dengan “*China First*”, dan pada akhirnya “setiap negara mengatakan *my country first*”. Artinya, proteksionisme Trump memicu efek domino: negara besar lain semakin terdorong bersikap mementingkan diri sendiri. Contohnya Tiongkok meningkatkan kebijakan *self-reliance* teknologi (Made in China 2025) untuk mengurangi ketergantungan pada impor AS, Eropa merumuskan strategi “*open strategic autonomy*” untuk melindungi kepentingan industrinya, dan seterusnya. Rivalitas dagang AS-Tiongkok pun merembet ke sektor teknologi (pembatasan ekspor microchip, sanksi Huawei) dan bahkan ruang siber serta informasi (perang disinformasi). Polarisasi “AS vs Tiongkok” ini membuat negara menengah seperti Indonesia harus pandai bersikap agar tidak terjebak dalam *crossfire* perang kepentingan dua raksasa.

Pelajaran positif dari langkah Trump dapat dilihat pada hasil jangka pendek ekonomi domestik AS. Selama 2017–2019, pertumbuhan ekonomi AS cukup stabil, tingkat pengangguran turun ke level terendah 3,5% (sebelum pandemi), dan sektor migas mengalami booming sehingga AS sempat menjadi eksportir netto energi. Amerika Serikat di bawah Trump praktis mencapai swasembada energi berkat revolusi shale gas/oil dan dukungan politiknya. Ini memperkuat posisi AS karena tidak lagi terlalu tergantung impor minyak Timur Tengah. Keberhasilan lain, setidaknya menurut pendukung Trump, adalah “membangunkan” sekutu untuk lebih serius memikul tanggung jawab pertahanan sendiri. Beberapa negara Eropa menaikkan budget militer, Jepang dan ROKO (Korea Selatan) bernegosiasi ulang pembagian biaya pangkalan AS. Dalam perspektif nasionalisme sumber daya, Trump berhasil memanfaatkan posisi pasar AS (melalui tarif) untuk memaksa relokasi sebagian manufaktur kembali ke

Amerika. Walau tidak semuanya berhasil, ada perusahaan yang memperluas produksi dalam negeri untuk menghindari tarif impor.

Namun demikian, langkah Trump juga membawa konsekuensi negatif dan kritik. Kebijakan proteksionisme ekstrim memicu balasan (retaliasi) dari mitra dagang: Tiongkok membalas dengan tarif terhadap produk AS, Eropa menerapkan tarif balasan pada produk pertanian AS, dll. Ini sempat menekan sektor pertanian AS (petani kedelai, jagung kehilangan pasar Tiongkok). Selain itu, gaya diplomasi Trump yang *unilateral* merenggangkan hubungan dengan sekutu tradisional. Keputusan mendadak seperti menarik diri dari perjanjian nuklir Iran, meremehkan NATO, hingga ancaman keluar dari WHO membuat reputasi dan *soft power* Amerika menurun. Survei global selama era Trump menunjukkan citra AS anjlok di banyak negara sekutu. Hal ini mengindikasikan melemahnya kepemimpinan global AS dan memberi ruang bagi Tiongkok mengisi pengaruh. Dari perspektif jangka panjang, nasionalisme sempit Trump juga dianggap *mengabaikan tantangan global kolektif* seperti perubahan iklim, sesuatu yang bisa melemahkan posisi AS di dunia jika masalah tersebut semakin genting.

Bagi Indonesia, implikasi rivalitas *America First vs China First* cukup kompleks. Di satu pihak, Indonesia dapat mengambil peluang dari perang dagang (misal: menarik relokasi investasi asing keluar dari Tiongkok ke Indonesia). Namun di lain pihak, Indonesia menghadapi dilema jika tensi AS-Tiongkok meningkat (contoh: sengketa Laut Cina Selatan, tekanan memilih blok). Pelajaran positif dari Trump adalah pentingnya kemandirian nasional agar posisi tawar kuat. Trump menunjukkan bahwa negara besar berani bersikap keras demi kepentingan nasionalnya. Bagi Indonesia, hal ini menginspirasi untuk lebih percaya diri menjalankan agenda *Indonesia First* yang sudah dicanangkan para pendiri bangsa. Indonesia perlu memastikan ketahanan internal (pangan, energi, pertahanan) cukup kuat sehingga tidak mudah didikte kondisi eksternal yang berubah-ubah.

Pelajaran negatifnya, Indonesia melihat bahwa isolasionisme berlebihan dapat merugikan kerjasama global yang dibutuhkan. Misalnya, saat pandemi COVID-19 melanda (2020), pendekatan unilateral Trump (keluar dari WHO) dikritik karena melemahkan respons bersama. Indonesia yang menganut politik luar negeri *bebas-aktif* tentu tidak ingin terjebak isolasionisme semacam itu. Maka, yang diambil adalah semangat kemandirannya, bukan penutupan diri. Selain itu, fluktuasi kebijakan AS di era Trump mengajarkan Indonesia untuk selalu menyiapkan *contingency plan* – misal: jika AS menerapkan proteksionisme ekstrim, Indonesia harus siap memperkuat pasar domestik atau mencari pasar alternatif.

Intinya, era Trump memberikan *wake-up call* bahwa sistem global bisa berubah cepat dan self-reliance menjadi tameng pertama setiap negara. Indonesia dapat memetik pelajaran untuk meningkatkan daya tahan ekonomi-pertahanan, namun tetap mewaspadaai agar jangan sampai kemandirian difafsirkan sebagai anti-kerjasama. Keseimbangan inilah yang kemudian akan dibahas dalam refleksi doktrin.

Kemandirian Logistik Pertahanan Indonesia

Kemandirian di bidang logistik pertahanan mencakup kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan persenjataan, amunisi, peralatan, serta pasokan pendukung (BBM, suku cadang, ransum, dll.) secara mandiri atau minimal tidak rentan diputus pihak luar. Bagi Indonesia, ini adalah area krusial namun menantang. Realitas saat ini, Indonesia masih mengimpor banyak alutsista utama: pesawat tempur canggih masih dibeli dari luar (Rusia, AS, dll.), kapal selam dari Korea Selatan (kerja sama), tank dari Eropa, rudal, radar, dan sistem elektronik pertahanan sebagian besar impor. Ketergantungan ini menimbulkan risiko strategis, misalnya jika terjadi embargo atau konflik interest, persediaan suku cadang bisa terhenti. Pengalaman embargo militer 1999-2005 oleh AS (terkait isu Timor Timur) memperlihatkan banyak pesawat TNI-AU *grounded* karena kekurangan *spare parts*.

Pemerintah Indonesia sadar akan hal ini dan telah mengambil berbagai langkah. Sejak awal 2010-an, Indonesia giat membangun industri pertahanan dalam negeri. PT Pindad mengembangkan medium tank (Kerjasama dgn Turki menghasilkan Tank Kaplan), senapan serbu SS2 dan amunisi berbagai kaliber diproduksi lokal. PT PAL berhasil membuat kapal perang jenis PKR-10514 (frigat) bekerjasama dengan DAMEN Belanda, yang menandai alih teknologi pembuatan kapal modern. PT Dirgantara Indonesia memproduksi pesawat angkut CN-235 dan sedang mengembangkan N-219, serta terlibat proyek jet tempur KFX/IFX dengan Korea (meski sempat tersendat). Upaya lain adalah diversifikasi sumber impor: bila dulu sangat bergantung pada blok Barat, kini TNI membeli alutsista dari banyak negara (Rusia untuk Sukhoi, China untuk radar dan senjata ringan, Eropa untuk helikopter, Turki dan Brasil untuk roket, dll.). Diversifikasi ini mencegah ketergantungan absolut pada satu pemasok.

Namun, tantangan menuju kemandirian penuh masih besar. Industri pertahanan Indonesia tergolong kecil dalam hal kapasitas produksi dan R&D. Belanja riset militer rendah (<<1% dari PDB), padahal inovasi teknologi sangat mahal. Akibatnya, produk lokal masih terbatas level menengah ke bawah (kendaraan taktis, senapan, kapal patroli) dan belum mampu produksi platform high-tech (jet tempur, kapal selam nuklir, sistem rudal jarak jauh). Ketergantungan teknologi asing belum terpecahkan. Sebagai contoh, Pesawat tempur IFX yang ingin dibuat lokal pun masih membutuhkan basis desain dari Korea dan komponen mesin dari Eropa/AS. Selain itu, kebutuhan cadangan logistik strategis belum optimal. Misalnya, cadangan BBM untuk operasi militer mungkin hanya cukup untuk beberapa minggu perang intensif, belum memiliki *stockpile* berbulan-bulan. Demikian pula cadangan amunisi nasional, sebagian besar masih dengan skema “*just in time*” (dibeli saat mau operasi atau latihan besar).

Kebijakan Trump memberikan perspektif bahwa rantai pasok pertahanan harus tahan guncangan global. Saat pandemi COVID-19 misalnya, banyak negara kekurangan pasokan militer (dan medis) karena rantai impor tersendat. Indonesia dapat belajar pentingnya membangun resiliensi supply chain dalam negeri. Beberapa langkah strategis yang bisa diambil: (1) Membentuk komponen cadangan logistik di TNI, yakni unit dan infrastruktur khusus untuk menyimpan serta memutar stok BBM, suku cadang, dan amunisi vital yang cukup untuk durasi konflik tertentu (misal 6 bulan). (2) Mengembangkan *domestic sourcing* maksimal untuk barang-barang kebutuhan militer umum: seragam, ransum, obat-obatan militer, dsb., sehingga tidak bergantung impor. (3) Menjalinkan *joint venture* dengan luar negeri yang mensyaratkan produksi lokal minimal 50%. Hal ini agar di situasi darurat, produksi bisa dilanjutkan di dalam negeri.

Selain hardware, kemandirian logistik juga mencakup penguasaan teknologi informasi dan siber untuk sistem pertahanan. Tanpa kemandirian di bidang enkripsi, satelit militer, dan jaringan siber, pertahanan modern bisa lumpuh oleh serangan asimetris. Indonesia masih harus meningkatkan kemampuan dalam negeri di sektor ini, mungkin melalui transfer teknologi dan penguatan industri *software/hardware* lokal bekerjasama BUMN-PTN (Perguruan Tinggi Negeri).

Hal lain, konsep “*Cadangan Strategis Nasional*” tidak hanya di sektor militer, tapi juga pangan, energi, dan air bagi penduduk sipil, karena pertahanan semesta mencakup ketahanan masyarakat. Pemerintahan Indonesia saat ini di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto mencanangkan misi *Asta Cita*, dimana salah satu poin utamanya adalah mendorong kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan, energi, dan air demi ketahanan nasional yang komprehensif. Ini sejalan dengan pandangan bahwa negara kuat harus swasembada di sumber-sumber kehidupan dasar. Dengan populasi 270 juta, ketahanan pangan-energi menjadi elemen vital dukungan logistik jangka panjang. Trump dengan “energi dominannya” mengingatkan bahwa meski Indonesia bukan produsen minyak besar, keamanan pasokan

BBM bisa dicapai lewat diversifikasi energi (biofuel, energi terbarukan) dan menjaga produksi domestik (misal meningkatkan kapasitas kilang, cadangan BBM minimal 30-90 hari kebutuhan).

Sebagai refleksi, Indonesia telah memiliki visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan mandiri dalam sistem senjata dan logistik. Untuk mencapainya, perlu integrasi kebijakan lintas sektor: sinergi Kemhan, BUMN Industri Pertahanan, Kemenperin, Kemristek, dan dukungan anggaran yang konsisten lintas pemerintahan. Membentuk ekosistem industri pertahanan yang berdaya saing global adalah keharusan. Tanpa itu, kemandirian hanya slogan. Pengalaman Amerika di bawah Trump menunjukkan political will dapat menggiatkan sektor domestik (contoh: insentif pajak bagi pabrik pulang kampung). Indonesia mungkin dapat mengadaptasi langkah sejenis, misal insentif bagi perusahaan swasta lokal untuk masuk rantai pasok pertahanan (Bela Negara di sektor industri). Intinya, kemandirian logistik pertahanan tidak berdiri sendiri, ia terkait dengan kemandirian ekonomi secara luas.

Refleksi Pancasila dan Doktrin TNI

Mencermati implikasi di atas, penting menakar kesesuaiannya dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai fundamental pertahanan Indonesia. Pancasila sila ke-3 dan sila ke-5 memberikan landasan etis bagi kemandirian nasional. Persatuan mengandung makna kemandirian bahwa bangsa Indonesia harus bersatu dalam berdiri di atas kaki sendiri, tidak diadu domba atau dijajah kembali. Keadilan sosial menekankan bahwa kekayaan alam dan sumber daya strategis harus dikelola negara demi kemakmuran rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir pihak apalagi bangsa asing. Prinsip ini tercermin jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyebut bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi, ketika Indonesia berupaya kemandirian energi atau pangan, sejatinya itu melaksanakan amanat konstitusi dan Pancasila.

Nilai historis perjuangan TNI juga mendukung filosofi kemandirian. Seperti tertuang dalam Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi (2021), nilai-nilai perjuangan TNI meliputi keberanian, kemanunggalan tentara-rakyat, rela berkorban, semangat pantang menyerah, jiwa patriotisme, dan lain-lain. Kemanunggalan TNI-rakyat berarti kekuatan pertahanan bersumber dari rakyat sendiri, patriotisme dan pantang menyerah mengajarkan tidak bergantung pada belas kasihan bangsa lain dalam berjuang. Sejarah 1945-49 menunjukkan Indonesia mampu bertahan meski minim persenjataan, karena didukung semangat dan kreativitas memanfaatkan sumber daya lokal (misal: senjata rampasan, bambu runcing, logistik swadaya rakyat). Spirit inilah yang harus terus dihidupkan dalam doktrin modern.

Belajar dari *America First*, Indonesia dapat memperbarui keyakinan bahwa kemandirian bukanlah isolasionisme, melainkan prasyarat agar kita bisa bebas dan aktif secara bermartabat. Pancasila sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan preambule UUD menugasi Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia. Artinya, Indonesia tidak akan menjadi negara yang menutup diri atau agresif merugikan bangsa lain. Kemandirian doktrin pertahanan versi Indonesia harus dibingkai dalam konsep "Berdikari yang Kooperatif". Kita berdiri di atas kaki sendiri, namun tangan tetap terbuka menjalin persahabatan yang saling menghormati. Ini sejalan dengan slogan diplomasi Indonesia: "seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak." Trump barangkali mengabaikan slogan ini, sehingga menghadapi banyak friksi. Indonesia justru harus menghindari itu dengan tetap fokus ke dalam tanpa melupakan keluar. Doktrin Pertahanan Negara yang baru dapat memasukkan unsur strategic partnership sebagai pelengkap kemandirian, yaitu membangun kerjasama internasional untuk hal-hal yang belum mandiri (misal pengadaan alat canggih sambil TOT) namun dengan syarat menguntungkan kepentingan nasional.

Secara filosofis, refleksi Pancasila mengingatkan agar dalam mengejar kemandirian, Indonesia tidak mengorbankan nilai moral. Kita tidak akan, misalnya, melakukan ekspansionisme merebut sumber daya negara lain (karena itu melanggar Pancasila sila 2 dan 5). Kemandirian yang beretika justru bisa menjadikan Indonesia contoh bagi negara berkembang lain, menunjukkan bahwa melalui pemerintahan bersih, dukungan rakyat, dan pengelolaan SDA yang bijak, sebuah negara bisa mandiri tanpa melanggar tatanan damai. Poin ini penting karena salah satu kritik ke Trump adalah ia dianggap merusak tatanan global demi Amerika. Indonesia tentu tidak ingin merusak tatanan, melainkan memperkuat posisinya di dalam tatanan dengan bekal kemandirian.

Dengan kata lain, nilai bebas-aktif dalam politik luar negeri Indonesia perlu diterjemahkan dalam doktrin pertahanan sebagai mandiri-aktif: mandiri dalam kemampuan, aktif dalam perdamaian dunia. Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan adaptasi ini. Semangat gotong royong yang terkandung di Pancasila pun dapat diperluas skalanya, bukan hanya gotong royong antar rakyat Indonesia, tetapi juga gotong royong internasional selama tidak melemahkan kemandirian bangsa. Konsep ini harmonis dengan pendekatan *cooperative security* yang diusung Indonesia di ASEAN (keamanan melalui kerjasama, bukan aliansi mengikat).

Pada akhirnya, refleksi ideologis ini menegaskan bahwa mengejar kemandirian pertahanan adalah bagian integral jati diri Indonesia, bukan hal baru atau pengaruh Trump semata. Trump hanya menjadi cermin eksternal yang membangkitkan diskusi internal bahwa Indonesia pun harus lebih berdikari. Nilai-nilai Pancasila dan jiwa TNI memberikan legitimasi moral bagi upaya tersebut.

Rekomendasi Strategis: Doktrin “Kemandirian Aktif”

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis merekomendasikan perumusan doktrin pertahanan Indonesia ke depan yang dapat disebut Doktrin Kemandirian Aktif. Doktrin ini mengawinkan imperatif kemandirian dengan karakter aktif-koperatif khas Indonesia. Adapun elemen-elemen strategis doktrin tersebut antara lain:

- a. *Self-Reliant Defense Posture*: Membangun postur pertahanan yang *self-reliant*, artinya sebisa mungkin *mawas diri* dalam penyediaan kekuatan. Ini meliputi:
 - 1) Penguatan Industri Pertahanan Nasional : percepatan transfer teknologi, investasi pada BUMN/IPTN pertahanan, menggandeng swasta nasional. Target spesifik jangka panjang: 80% kebutuhan alutsista TNI bisa diproduksi atau dirakit dalam negeri tahun 2045 (selaras target KKIPI).
 - 2) Cadangan Strategis Nasional : pembentukan cadangan material (BBM, amunisi, suku cadang) yang dikelola TNI bersama instansi terkait. Misalnya, TNI AD, AL, AU memiliki *war reserve stock* minimal untuk 6 bulan operasi penuh, disimpan tersebar di pulau-pulau strategis. Hal ini untuk menjamin kelangsungan operasional di awal konflik sebelum bantuan produksi dipercepat.
 - 3) Pengembangan Energi Pertahanan : mengikuti arahan Kemhan, memanfaatkan energi terbarukan lokal (biofuel untuk kendaraan militer, solar di basis terpencil) agar operasi tidak lumpuh jika impor BBM terganggu. Setiap pangkalan utama disarankan punya pembangkit listrik mandiri (*solar cell, diesel stock*) untuk *islanding capability*.
- b. *Active Defense Diplomacy*: Sejalan dengan kemandirian, doktrin baru harus menegaskan *aktifnya* diplomasi pertahanan Indonesia. Ini meliputi:
 - 1) Kerjasama Internasional Non-Blok : memperkuat kemitraan pertahanan dengan banyak negara tanpa mengikat perjanjian aliansi formal. Contoh: latihan gabungan

multilateral, tukar menukar pendidikan militer, peran aktif di *UN Peacekeeping*. Walaupun mandiri, Indonesia tetap harus hadir di forum global (ADMM-Plus, *UN Peacekeeping*) untuk menyuarakan kepentingan dan belajar teknologi.

2) Diplomasi “Seribu Kawan” : mengupayakan hubungan baik dengan semua kekuatan besar. Doktrin menganjurkan diversifikasi sumber alutsista bukan hanya demi teknis, tapi juga politis: menjaga keseimbangan relasi.

3) Bela Negara di Forum Global : artinya, berani menyuarakan kepentingan nasional di forum dunia secara tegas (misal: veto impor senjata jika disertai syarat merugikan, dll.), namun tetap konstruktif.

c. Integrasi Kemandirian dan Kesejahteraan: Doktrin Kemandirian Aktif harus mendukung prinsip bahwa pertahanan kokoh dibangun berdampingan dengan kesejahteraan rakyat. Jadi, program seperti Bela Negara bisa diperluas ke sektor industri dan teknologi: melibatkan ilmuwan, insinyur, dan pengusaha lokal dalam ekosistem pertahanan. Pemerintah bisa memberikan insentif bela negara bagi perusahaan yang berkontribusi substitusi impor strategis. Ini mirip mobilisasi nasional di masa perang, tapi diterapkan di masa damai untuk kemandirian. Dengan demikian, doktrin pertahanan tidak dilihat sebagai beban (*guns vs butter*) melainkan investasi yang menggerakkan ekonomi (*defense-driven development*).

d. *Adaptive Leadership and Innovation*: TNI dan Kemhan perlu menerapkan kepemimpinan adaptif dalam menjalankan doktrin ini. Dunia berubah cepat (*cyber warfare, drone swarms, AI di militer*). *Kemandirian Aktif* menuntut TNI adaptif, mampu mengadopsi teknologi baru melalui inovasi lokal. Misal, merintis *start-up* pertahanan di bidang *cyber* dan *AI* dengan dukungan inkubasi dari pemerintah. Lalu, kepemimpinan TNI harus *out of the box*: berani memotong birokrasi lambat dalam pengadaan dengan memberi ruang lebih besar pada industri dalam negeri walau mungkin awalnya kualitas belum sempurna. Konsep *learning by doing* berlaku: gunakan produk lokal di latihan agar bisa dievaluasi dan ditingkatkan.

Rekomendasi di atas disusun sejalan arahan Kementerian Pertahanan yang pernah disampaikan dalam buletin pertahanan: bahwa energi dan kemandirian industri adalah kunci kekuatan pertahanan masa depan. Selain itu, visi *Indonesia Emas 2045* pemerintah saat ini telah memasukkan agenda kemandirian pangan-energi-air seperti disebut sebelumnya, sehingga doktrin pertahanan tinggal mensinergikan secara operasional di level militer.

Implementasi doktrin Kemandirian Aktif tentunya membutuhkan dukungan politik menyeluruh. DPR RI perlu memberikan landasan legislasi (misal UU Cadangan Strategis, perbaikan UU Industri Pertahanan). Anggaran pertahanan idealnya ditingkatkan secara terukur menuju 1,5-2% PDB dengan porsi signifikan untuk riset dan pengembangan. Pengawasan terhadap BUMN pertahanan juga harus ditingkatkan agar efisien dan inovatif, tidak terjebak monopoli birokratis. Apabila dijalankan konsisten, dalam jangka panjang Indonesia dapat keluar dari “jebakan negara importir pertahanan” dan bertransformasi menjadi negara produsen pertahanan regional.

Kesimpulan

Gaya kepemimpinan Donald Trump dengan jargon *America First* dan kebijakan nasionalisme sumber daya menegaskan kembali urgensi kemandirian bagi ketahanan nasional sebuah negara besar. Trump menunjukkan bahwa Amerika Serikat berusaha menjadi kuat dengan memanfaatkan sepenuhnya sumber daya domestiknya, dari industri, teknologi hingga energi, dan berani menentang sistem global yang dianggapnya merugikan. Implikasi positifnya, AS di era Trump mampu mencapai tingkat

swasembada energi yang tinggi dan menggiatkan kembali sektor industri pertahanan dalam negeri. Namun, di sisi lain pendekatan tersebut mengurangi dukungan aliansi dan menimbulkan tensi dagang, yang menjadi pelajaran bahwa kemandirian harus diimbangi kerjasama agar berkelanjutan.

Bagi Indonesia, refleksi atas kebijakan Trump memberikan dorongan untuk mempercepat perwujudan doktrin pertahanan yang mandiri. Indonesia sejak lama memiliki prinsip berdikari dan pertahanan semesta, sehingga spirit-nya sejalan, tinggal implementasi yang diperkuat. Doktrin pertahanan Indonesia ke depan perlu menempatkan kemandirian logistik dan alutsista sebagai pilar utama, tanpa meninggalkan prinsip bebas-aktif dalam politik luar negeri. Dengan merumuskan Doktrin Kemandirian Aktif, Indonesia bisa meneguhkan komitmen bahwa pertahanan negara akan dibangun dengan sumber daya sendiri semaksimal mungkin, sementara diplomasi tetap aktif untuk perdamaian dan kemajuan bersama.

Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan Indonesia menjadi bangsa maju, berdaulat, adil, dan makmur di usianya yang ke-100 tahun. Untuk mencapai itu, sektor pertahanan harus berkarakter Indonesia: mandiri secara sistem senjata dan logistik, ditopang industri nasional yang kuat, serta mampu berdiri tegak di tengah percaturan global tanpa tergantung pada kekuatan asing. Dengan kekuatan militer-ekonomi yang tangguh, Indonesia dapat memastikan kelangsungan hidup dan martabat bangsa tetap terjaga. Langkah-langkah yang diuraikan, mulai dari pembangunan industri pertahanan, ketahanan energi-pangan, hingga diplomasi pertahanan aktif, merupakan investasi jangka panjang yang harus mulai digarap serius sekarang.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa kemandirian pertahanan bukanlah opsi melainkan keniscayaan bagi Indonesia. Gaya Trump mungkin kontroversial, tetapi pesan fundamentalnya tentang pentingnya *national resilience* tidak boleh diabaikan. Indonesia dengan falsafah Pancasila dan modal sejarah perjuangannya memiliki fondasi kuat untuk berdikari. Dengan strategi yang tepat, dukungan seluruh komponen bangsa, dan belajar dari pengalaman bangsa lain, Indonesia dapat mewujudkan postur pertahanan yang mandiri dan disegani, tanpa harus mengorbankan jati diri sebagai bangsa yang cinta damai. Inilah refleksi penting dari kepemimpinan Trump bagi Indonesia bahwa menjaga kedaulatan NKRI di era modern menuntut kita berswasembada dalam segala hal yang vital. Semoga di masa mendatang, Indonesia tumbuh menjadi negara kuat yang mandiri namun tetap menjunjung perdamaian dunia, sesuai amanat para pendiri bangsa.

Daftar Pustaka

- Trump, D. (2017). *National Security Strategy of the United States of America* – White House (menekankan konsep “Energy Dominance” sebagai sentral kekuatan Amerika yang makmur dan aman melalui pemanfaatan penuh sumber energi domestik [brookings.edu](https://www.brookings.edu)).
- Kementerian Pertahanan RI. (2024). *Membangun Kekuatan Pertahanan melalui Pengelolaan Energi* – Buletin Kemhan (menegaskan energi sebagai salah satu tulang punggung stabilitas keamanan dan operasional pertahanan nasional kemhan.go.id; ketahanan energi vital untuk sistem pertahanan semesta kemhan.go.id).
- Gusman, I. (2025). *Indonesia First yang Berdikari di Tengah Guncangan Dunia* – Times Indonesia (mengulas sejarah prinsip *berdikari* Indonesia sejak era Soekarno hingga kini; menekankan Indonesia telah lama berupaya berdiri di atas kaki sendiri dan perlunya kembali ke strategi Indonesia First demi ketahanan dalam negeri di tengah rivalitas global timesindonesia.co.id).
- TNI Angkatan Darat. (2021). *Doktrin Kartika Eka Paksi* – Manajemenhan Akmil (memuat nilai-nilai kejuangan TNI AD seperti keberanian, kemanunggalan TNI-rakyat, rela berkorban, semangat

pantang menyerah, patriotisme, yang semuanya menggarisbawahi ethos kemandirian dalam perjuangan pertahananmanajemenhan.akmil.ac.id).

Pemerintah Indonesia. (2025). *Asta Cita: Delapan Misi Menuju Indonesia Emas 2045* – Kantor Staf Presiden/UNESA (dokumen visi misi pemerintah 2024-2029 di mana Misi ke-2 menekankan penguatan pertahanan dan keamanan nasional serta mendorong kemandirian pangan, energi, dan air untuk ketahanan nasional komprehensifpendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id).

Sidauruk, R. (2025). *80 Tahun RI: Memaknai Kemerdekaan Sejati Menuju Indonesia Emas 2045* – Antara News (artikel telaah yang mengutip pandangan Presiden Prabowo tentang kekuatan sebagai prasyarat mempertahankan kemerdekaan; transformasi Trisakti Sukarno menjadi slogan “Indonesia First, make Indonesia great again”; serta perlunya membangun kekuatan militer-ekonomi yang tak tertandingi demi melindungi kepentingan nasional dan martabat bangsaantaranews.comantaranews.com).